

MUI Sumut: Perayaan Imlek Tunjukkan Toleransi Antarpemeluk Agama

MEDAN (IM)- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Utara Bidang Dakwah, Prof Dr H. Mohd Hatta mengatakan perayaan Hari Imlek 2023 menunjukkan toleransi dan keretakan antarpemeluk agama dan etnis di Indonesia. "Alhamdulillah perayaan Imlek berjalan dengan baik bahkan kelihatan sangat meriah karena banyak fasilitator yang mendukung perayaan itu," katanya di Medan, Selasa (24/1).

Ia menyebutkan masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim sangat menjunjung tinggi rasa persaudaraan yang erat dalam berbagai perbedaan yang ada di Tanah Air. Hal itu tercermin dalam budaya gotong royong dalam berbagai kegiatan yang meretas berbagai perbedaan yang ada. "Sikap toleransi dan saling menghargai adalah pusaka leluhur yang masih dipakai dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia," katanya.

Ia mengatakan berbagai program pemerintah untuk mem-

pertahankan budaya ini pastilah diapresiasi asalkan tidak dibumbui politik belah bambu. Berdiri secara adil, anif dan bijaksana, kata dia, seyogyanya dapat dirasakan dengan nyaman bagi penganut agama. "Tentunya upaya pemerintah yang diharapkan bukan simbol yang kian hari terasa meresahkan," katanya.

Hatta menambahkan program pemerintah dalam memelihara toleransi antarumat beragama dan meningkatkan kualitas persatuan dan kesatuan antar suku dan agama di Indonesia selama ini benar-benar terwujud dengan baik dan saling menghargai.

Peningkatan kualitas kerukunan umat beragama yang berdampak penguatan persatuan dan kesatuan menjadi modal besar pemerintah dan semua pihak dalam mengoptimalkan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Rukun menjadi kunci untuk menopang sukses pembangunan yang diselenggarakan pemerintah pusat dan daerah. ● **pra**

Fly Over Kedua di KBB Siap Dibangun

NGAMPRAH (IM)- Rencana pembangunan Fly Over baru yang menghubungkan Stasiun Padalarang dengan Kota Baru Parahyangan, Kabupaten Bandung Barat (KBB) bakal dikhususkan untuk angkutan umum. "Tujuan tersebut (fly over) dilakukan untuk penguatan kapasitas angkutan umum. Dengan begitu, lalu lintas di kawasan tersebut tak mengalami hambatan," ungkap Plt. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) KBB, Fauzan Azima kepada wartawan, Selasa (24/1).

Sementara itu, lanjut dia, untuk kendaraan pribadi masih menggunakan jalur yang saat ini digunakan, seperti Jalan Panans dan Jalan Cahaliwung. "Hal itu dilakukan agar warga yang hendak ke stasiun maupun sebaliknya bisa menggunakan angkutan umum," ujarnya.

"Nantinya kendaraan pribadi pengantar maupun penumpang parkir di sekitar Kota Baru Parahyangan," sambungnya.

Ia menyebut, fly over kedua yang tengah dibangun tersebut juga ditargetkan rampung pada Juni 2023 bersamaan dengan beroperasinya Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB).

Kendati demikian, pihaknya pun tak memungkiri ketika proyek pembangunan fly over berjalan tentu bakal berpengaruh pada lalu lintas sekitar Padalarang.

Oleh karena itu, Dishub KBB akan menempatkan personel dan melakukan rekayasa jalan," sebutnya. Meski begitu, secara umum untuk memecahkan persoalan kemacetan saat ini Dishub KBB tengah menerapkan manajemen rekayasa lalu lintas di wilayah Padalarang. "Jalan Raya Padalarang merupakan jalan nasional sehingga kita mengusulkan agar di titik kemacetan dipasang traffic light. Seperti di Simpang Pasar Tagog, Cahaliwung, dan Purabaya," ujarnya.

Ia mengaku, Cimareme menjadi titik kemacetan yang hingga kini belum mampu terselesaikan. Sebab, terjadi penyempitan badan jalan dari arah Padalarang menuju Cimareme. "Ada bottle neck (penyempitan) badan jalan. Inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadi kemacetan lalu lintas dari arah Padalarang menuju Cimareme," ujarnya. ● **pra**

8 Nusantara



PEMBONGKARAN LAPAK PKL DI KOTA BOGOR

Sejumlah petugas gabungan membongkar lapak PKL di kawasan Pasar Kebon Kembang, Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (24/1). Pembongkaran ratusan lapak PKL yang mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum tersebut merupakan target prioritas Pemerintah Kota Bogor dalam penataan kawasan sekitar khususnya kesemrawutan kota.

Rudy Susmanto Siap Penuhi Panggilan Kejari Kab. Bogor

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto siap memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, walaupun hingga saat ini belum mendapatkan surat yang dimaksud. Dia menerangkan bahwa ketika dana perhelatan Pemilu itu dianggarkan atau bahkan dicairkan, dirinya belum menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

CIBINONG (IM)

Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto siap memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor, untuk mengklarifikasi dana perhelatan pemilihan umum (Pemilu) serentak di Tahun 2019 lalu oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Kabupaten Bogor.

Seperti diketahui, selain mendapatkan dana Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) sebesar Rp148 miliar, KPU Kabupaten Bogor juga mendapatkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor

sebesar Rp8,5 miliar.

"Saya siap memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, walaupun hingga saat ini belum mendapatkan surat yang dimaksud," kata Rudy Susmanto kepada wartawan, Selasa (24/1).

Rudy Susmanto menerangkan bahwa ketika dana perhelatan Pemilu itu dianggarkan atau bahkan dicairkan, dirinya belum menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor.

"Saya akan jelaskan, terkait penyusunan anggaran dan bahkan masuk ke dalam APBD Perubahan di Tahun Anggaran 2019, saya bukan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Karena saya dilantik di saat akhir Tahun 2019 atau tepatnya pada tanggal 23 September," terangnya.

Sebelumnya, Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menuturkannya akan memanggil Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Hal itu setelah jajaran Kejari itu telah memanggil sekitar 20 orang baik itu Komisioner maupun pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bogor.

Komisioner dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Bogor dimintai keterangan atau klarifikasi oleh Seksi Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, hal itu setelah pihak kejaksaan menerima laporan dari salah seorang warga.

"Kami juga akan memanggil Ketua DPRD Kabupaten Bogor," tutur Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Dodi Wiraatmaja di

awal Bulan Januari lalu.

Dodi Wiraatmaja menerangkan, dari informasi yang dihimpun dari pihak KPU Kabupaten Bogor mengaku sudah mengembalikan anggaran yang sebelumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, ke Irjen KPU Republik Indonesia.

Mantan Kepala Seksi Perdana dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Purwakarta ini menerangkan bahwa secara aturan, hibah dari APBD Kabupaten Bogor untuk perhelatan Pemilu serentak lalu diperbolehkan, tetapi tidak harus dalam bentuk barang dan bukannya uang.

"Yang jelas kami minta pertanggung jawaban penggunaan dana-dana hibah dimaksud, kalau tidak bisa maka bisa naik ke penyelidikan," tuturnya. ● **gio**

Disdik Gelar Bimtek Dana BOS SMP

BOGOR (IM)- Dinas Pendidikan (Disdik) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) APBN/BOSP tahun anggaran 2023 jenjang SMP Kota Bogor pada Selasa (24/1).

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Hj. Syarifah Sofiah Dwikorawati, mengarahkan agar para Kepala Sekolah (Kepsek) SMP Negeri Sekota Bogor mengikuti petunjuk pelaksanaan (Juklak) dana BOS tahun 2023 dan wajib menghindari adanya temuan yang terjadi dari tahun sebelumnya. Dalam Bimtek dana BOS ini juga hadir Kasi Intel Kejari Kota Bogor, Sigit Prabawa untuk memberikan arahan.

Sekda Hj. Syarifah Sofiah Dwikorawati menuturkan, dalam APBD itu anggaran Disdik harus anggaran di atas 20 persen, untuk memberikan prioritas pelaksanaan bidang pendidikan. Tingkat SMP sekitar Rp50 miliar bagi SMP negeri dan swasta, itu yang harus dikelola secara berjenjang tingkat kota sampai sekolah.

"Ya, itu harus dilaksanakan dengan baik. Juklak tahun 2022 ada perbedaan 2023 ini, karena

tahun lalu sangat disibukkan tiga tahap pelaporan. Jadi disibukkan persoalan administrasi, sehingga pelaporan tahun 2023 ini hanya dua tahap," ungkap Syarifah.

Syarifah memaparkan, kesulitan pelaporan administrasi ternyata didengar oleh pemerintah pusat, tentunya dengan disederhanakan pelaporan tetapi dengan catatan harus cepat. Apabila lambat akan dikenakan pemotongan, sehingga ada titik strategis yang harus dipelajari oleh semua sekolah.

"Kami melakukan evaluasi dengan tim BOS Kota Bogor dari tahun 2022. Ya, dari penyerapan anggaran secara nasional, angka penyerapan 98 persen dan lingkup SMP Kota Bogor mencapai 97 persen untuk dana BOS. Diharapkan tahun ini ada perbaikan mudah-mudahan meningkat dari 97 persen. Baiknya dibuat buku tentang adanya penemuan setiap tahun yang terjadi, sehingga tidak terulang di tahun yang akan datang," paparnya.

"Isi bukunya bagaimana kita menghindari temuan, kaitan dengan temuan-temuan.

Karena masih ada honor yang tidak sesuai dengan standar biaya. Baik honorarium dan lainnya harus memperhatikan standar, jangan ada yang lebih tinggi dari pembiayaan. Sehingga jangan sampai terjadi lagi dan menjadi perhatian kita semua. Pelajari penggunaan aplikasi 'Siplah'. Ada wacana penyedia jasa akan dikumpulkan, disamakan frekuensinya. Jangan sampai berbeda dengan juklak.

Bendahara semua diharapkan mempunyai sertifikat, jangan sampai jadi temuan bendahara tidak memiliki sertifikat," tambah Syarifah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi memaparkan, semua dana yang didapat daerah harus dilaporkan oleh kepala daerah, walaupun masuk ke rekening sekolah. Maka kami harus membuat bimtek dan mengasistensi, agar semua mengacu kepada mekanisme Permendagri dan Perpres. Sehingga nanti akan diadakan asistensi, ada dari BKAD, Bappeda, Adalbang, PBJ dan OPD terkait lainnya. Dengan harapan mengacu kepada standar yang ditentukan, terangnya. ● **pra**

Satpol PP Tertibkan 400 Lapak PKL di Pasar Anyar Bogor

BOGOR (IM)-Sebanyak 400 lebih lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pasar Anyar, Kota Bogor ditertibkan petugas gabungan TNI-Polri dan Satpol PP Kota Bogor. Penertiban dilakukan karena di lokasi tersebut akan dibangun pedestrian.

"Hari ini ada sekitar 400-an lapak yang ditertibkan di kawasan pasar Anyar. Penertiban dilakukan di tiga titik, di antaranya di Jl Sawo Jajar, Jl Dewi Sartika dan Jl MA Salmun. Lapak mereka ada yang semi permanen dan lapak gelar dadakan ya," kata Kabid Trantibum Satpol PP Kota Bogor, Andry Sinar Wahyudianto, Selasa (24/1).

Andri menyebutkan, penertiban dilakukan karena kawasan tersebut akan ditata menjadi ruang publik. Lokasi tempat berdirinya PKL, akan dibangun jalur pedestrian. "Karena selain tidak diperbolehkan berdagang

di situ, penertiban dilakukan karena akan ada penataan, ke depan PUPR akan bangun pedestrian disitu," kata Andri.

"Alhamdulillah penertiban berjalan lancar, tidak ada perlawanan dari pedagang dan konduktif. Sebelum penertiban kita sudah sosialisasikan sejak dua minggu lalu, jadi mereka sudah tahu akan ditertibkan," tambahnya.

Setelah lapak PKL dibongkar, Dinas Lingkungan Hidup bergerak untuk mengangkut sampah dan Dinas PUPR melakukan normalisasi saluran air. Penertiban juga dilanjutkan dengan penyempromotan oleh Damkar Kota Bogor.

Andry menyebut, PKL sejak sebelumnya sudah diminta untuk berdagang di tempat yang sudah disiapkan Pemkot Bogor. Di antaranya yakni, Blok C, D dan F Pasar Dewi Sartika, Pasar Jambu Dua, Pasar Cilendek dan Pasar Sukasari. ● **jay**

Kaesang Minta Restu Jokowi dan Gibran Terjun ke Dunia Politik

SURAKARTA (IM)-Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep, mengutarakan keinginannya untuk terjun ke dunia politik. Keinginan tersebut dia utarakan kepada kakaknya, Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka, dan ayahnya, Jokowi.

"Yang kami bicarakan di meja makan itu Kaesang. Saya juga kaget, dia secara terbuka menyampaikan ke kami ada ketertarikan di politik," kata Gibran di Surakarta, Selasa (24/1).

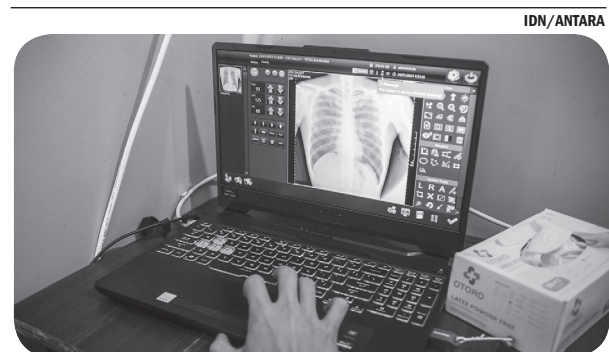
Gibran mengatakan keinginan itu disampaikan Kaesang sendiri di depan dirinya dan ayahnya, Jokowi, saat pulang ke Surakarta. "Nggak tahu, saya baru dengar kemarin. Bapak juga kaget. Biasanya nggak pernah membicarakan itu, ini penajakan dulu," tambahnya.

Meski demikian, ia belum

tahu apakah Kaesang akan mulai terjun pada Pemilihan Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Gibran mengatakan ketertarikan Kaesang tersebut karena ingin berkontribusi pada daerah. Apalagi, sejak beberapa tahun terakhir, putra bungsu Jokowi itu juga sudah terjun langsung mengurus Klub Sepak Bola Persis Surakarta.

"Kalau saya lihat, misalnya Persis, itu kan yang kerja keras Kaesang. KLB (Kongres Luar Biasa) PSSI kan Kaesang juga intens di situ. Kalau saya lihat, mampu, anak muda, tapi belajarnya cepat," katanya memuji Kaesang.

Terkait partai politik yang ingin diikuti oleh Kaesang, Gibran mengaku belum mengetahuinya. "Nanti biar Kaesang saja yang memutuskan," imbuhnya. ● **pra**



SKRINING KESEHATAN PARU DI BANDUNG

Petugas kesehatan menunjukkan hasil rontgen paru seorang warga yang mengikuti skrining kesehatan paru di Kelurahan Sukaraja, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/1). Kementerian Kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kota Bandung melakukan skrining kesehatan paru secara gratis kepada 200 orang warga Kelurahan Sukaraja yang diduga melakukan kontak erat dengan penderita TB.

Yogyakarta Tekan Produksi Sampah Organik, Ditargetkan Berkurang 50-75 Ton per Hari

YOGYAKARTA (IM)- Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya mengurangi sampah yang diangkut ke TPA Piyungan dengan menjalankan gerakan nol sampah anorganik. Tak hanya itu, pengelolaan sampah juga dibenahi. "Pengurangan volume sampah yang dibuang ke TPA Piyungan merupakan target dari gerakan ini, khususnya mengurangi sampah anorganik, karena 40 persen sampah yang dihasilkan adalah sampah anorganik," kata Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta, Aman Yuniadjaya, di Yogyakarta, Selasa (24/1).

Selama tahun 2022, sampah dari Kota Yogyakarta yang masuk ke TPA Piyungan rata-rata sekitar 260 ton per hari. "Kami berharap melalui gerakan ini akan ada penurunan volume sampah hingga 50 ton sampai 75 ton per hari," kata Aman.

Selain menjalankan gerakan nol sampah anorganik, Pemerintah Kota Yogyakarta berusaha mengoptimalkan pengelolaan sampah dengan menyediakan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Nitikan dan mengupayakan penyediaan lokasi pengelolaan sampah di luar kota. "Ini dilakukan sebagai antisipasi masalah sampah

karena TPA Piyungan diperkirakan tidak lagi mampu menampung sampah pada tahun ini," kata Aman.

Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan truk yang berbeda untuk mengangkut sampah organik dan sampah residu di depo atau Tempat Penampungan Sementara (TPS). Hal ini guna mendukung pelaksanaan gerakan nol sampah anorganik. "Di depo atau TPS yang memiliki ruang cukup akan ada dua truk yang disediakan. Satu untuk sampah organik dan satu lagi untuk sampah residu," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto.

Menurut dia, tempat penampungan sementara atau TPS yang sudah membedakan kendaraan pengangkut sampah berdasarkan jenis sampah antara lain TPS Tompeyan dan Pengok. Guna menambah armada pengangkut sampah, Pemerintah Kota Yogyakarta mengalokasikan dana Rp25 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2022 untuk pengadaan 20 truk sampah, termasuk compactor truck dan dump truck. ● **pra**



PELANTIKAN PPS DI CIAMIS

Sejumlah anggota Panitia Pelantikan Suara (PPS) mengikuti pelantikan Badan Adhoc PPS di Gedung Islamic Center, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Selasa (24/1). KPUD Ciamis menyebutkan 70 persen dari 795 anggota PPS yang dilantik merangkap jabatan sebagai perangkat desa dan pegawai honorer dan nantinya akan ditempatkan di 265 Desa dan Kelurahan pada Pemilu serentak 14 Februari 2024.